

## **BAB III**

### **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

#### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

##### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Kebijakan umum pendapatan daerah pada tahun 2009-2013, adalah:

1. Mendorong meningkatnya pendapatan daerah dari komponen-komponen penerimaan PAD yang masih memiliki peluang dan potensi intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat;
2. Mengupayakan tercapainya laju pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 10% per tahun dari pencapaian tahun sebelumnya;
3. Dana Perimbangan diharapkan minimal sama besarnya dari realisasi tahun-tahun sebelumnya dengan asumsi masih terjadi *fiscalgap* antara pendapatan-belanja daerah, dengan mengupayakan ketepatan dan kelancaran dalam realisasinya;
4. Optimalisasi dana APBN dan BLN untuk menunjang pembangunan daerah;
5. Optimalisasi aset daerah untuk peningkatan PAD.

Kebijakan pendapatan tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi NTB Tahun 2009-2013, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan PAD, antara lain:

- a. Melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, dan pada tahun 2011 dasar hukum pungutan Pendapatan Asli Daerah telah dirubah dengan diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- b. Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan SKPD pengelola pendapatan daerah setiap triwulan.
- c. Melakukan penyempurnaan sistem aplikasi Pajak Daerah dari manual ke sistem online.
- d. Melakukan penyempurnaan data base obyek pajak daerah .
- e. Melaksanakan operasi gabungan untuk menjaring kendaraan luar daerah yang telah berdomisili di wilayah NTB minimal 3 bulan berturut-turut dan

kendaraan yang menunggak pajak bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan.

- f. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah.
- g. Melakukan sosialisasi pemungutan pajak daerah kepada wajib pajak/masyarakat bekerjasama dengan pihak Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota disamping itu melakukan sosialisasi melalui media elektronik dan media lainnya.
- h. Pada tahun 2010, telah dilaksanakan pengadaan 3 (tiga) unit kendaraan samsat keliling untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak/masyarakat. Tahun 2011 telah dianggarkan penambahan kendaraan samsat keliling sebanyak 4 unit. Tahun 2012 penambahan kendaraan samsat keliling sebanyak 1 unit, sehingga sampai dengan tahun 2012 jumlah kendaraan samsat keliling berjumlah 8 unit.
- i. Untuk mempercepat proses pembayaran PKB, secara bertahap telah dibentuk pelayanan Drive Thru :
  - Tahun 2011 telah dibuka pelayanan Samsat Drive Thru berlokasi di Kota Mataram dan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
  - Pada tahun 2012 telah dilakukan renovasi bangunan eks jembatan timbang di Saliperate Sumbawa yang dimanfaatkan sebagai tambahan sarana pelayanan Samsat Drive Thru, dan penambahan Drive Thru juga dilakukan pada Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
  - Penambahan Samsat Drive Thru pada Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dan di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar dimana dana pembangunan gedungnya berasal dari bantuan PT. Bank NTB sebagai mitra kerja Dinas Pendapatan pada Kantor Samsat. Sampai dengan tahun 2012 jumlah Pelayanan Drive Thru telah berjumlah 6 titik layanan. Kedepannya telah direncanakan untuk menambah tempat pelayanan pada Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Kecamatan Kediri dengan memanfaatkan jembatan timbang Kediri dan pada daerah Sepapan Kecamatan Jerowaru untuk Samsat Pembantu dan di Paok Motong di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.

Dengan kebijakan tersebut diperoleh Pendapatan Daerah selama 5 tahun sebagai berikut.

Tabel 3.1  
Pertumbuhan Pendapatan Daerah  
Tahun 2008 - 2012

No.	Uraian	2008		2009		2010		2011		2012		Rata-Rata Pertumbuhan
		Jml Penerimaan	Pertumbuhan	Jml Penerimaan	Pertumbuhan	Jml Penerimaan	Pertumbuhan	Jml Penerimaan	Pertumbuhan	Jml Penerimaan	Pertumbuhan	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>											
<b>1.1</b>	<b>PAD</b>	<b>434.192.088.288,75</b>	<b>29,84</b>	<b>474.455.062.324,08</b>	<b>9,27</b>	<b>515.340.956.845,65</b>	<b>8,62</b>	<b>741.291.174.995,39</b>	<b>43,84</b>	<b>745.979.866.410,00</b>	<b>0,63</b>	<b>18,44</b>
1.1.1	Pajak Daerah	348.568.544.102,00	34,80	369.172.468.753,00	5,91	391.690.341.968,00	6,10	506.909.925.653,00	29,42	580.615.755.680,00	14,54	18,15
	a. PKB	88.679.141.800,00	19,60	107.767.730.515,00	21,53	121.518.483.332,00	12,76	142.684.620.853,00	17,42	165.096.438.321,00	15,71	17,40
	b. BBNKB	120.527.137.250,00	25,77	150.273.380.410,00	24,68	160.875.148.303,00	7,05	234.620.995.303,00	45,84	260.506.253.755,00	11,03	22,88
	c. BBNKB	138.304.603.212,00	57,94	109.960.739.667,00	(20,49)	108.067.238.072,00	(1,72)	129.411.168.657,00	19,75	154.797.146.194,00	19,62	15,02
	d. Pajak Air Permukaan	56.856.161,00	2,89	62.666.280,00	10,22	69.911.790,00	11,56	193.140.840,00	176,26	215.917.410,00	11,79	42,54
	e. Pajak Air Bawah Tanah	1.000.805.679,00	2,61	1.107.951.881,00	10,71	1.159.560.471,00	4,66		(100,00)		-	(16,41)
1.1.2	Retribusi Daerah	41.604.947.471,09	37,06	50.047.842.702,10	20,29	54.900.839.090,63	9,70	59.564.965.781,72	8,50	10.129.107.556,00	(82,99)	(1,49)
1.1.3	Laba Perusahaan Daerah	17.161.166.400,00	16,37	25.192.762.479,00	46,80	40.937.454.515,00	62,50	135.639.075.065,00	231,33	53.821.735.694,00	(60,32)	59,34
1.1.4	Lain-lain Penerimaan	26.857.430.315,66	(12,60)	30.041.988.389,98	11,86	27.812.321.272,02	(7,42)	39.177.208.495,67	40,86	101.413.267.480,00	158,86	38,31
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>626.994.172.867,93</b>	<b>17,32</b>	<b>701.175.944.010,34</b>	<b>11,83</b>	<b>756.256.439.498,00</b>	<b>7,86</b>	<b>855.310.098.727,00</b>	<b>13,10</b>	<b>1.054.470.183.114,00</b>	<b>23,29</b>	<b>14,68</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bkn Pajak	78.492.694.867,93	3,29	98.719.980.010,34	25,77	158.426.609.498,00	60,48	162.674.615.727,00	2,68	191.526.128.114,00	45,48	27,54
1.2.2	DAU	511.286.478.000,00	14,21	554.431.964.000	8,44	573.065.430.000,00	3,36	646.671.083.000,00	12,84	809.617.715.000,00	25,20	12,81
1.2.3	DAK	37.215.000.000,00	-	48.024.000.000	29,04	24.764.400.000,00	(48,43)	45.964.400.000,00	85,61	53.326.340.000,00	16,02	16,45
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>9.500.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>341.325.000</b>	<b>(96,41)</b>	<b>620.662.500,00</b>	<b>81,84</b>	<b>92.749.975.000</b>	<b>14.843,71</b>	<b>442.367.135.000,00</b>	<b>376,95</b>	<b>3.041,22</b>
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>1.070.686.261.156,68</b>	<b>23,23</b>	<b>1.175.972.331.334,42</b>	<b>9,83</b>	<b>1.272.218.058.843,65</b>	<b>8,18</b>	<b>1.689.351.248.722,39</b>	<b>32,79</b>	<b>2.242.817.184.524,00</b>	<b>32,76</b>	<b>21,36</b>

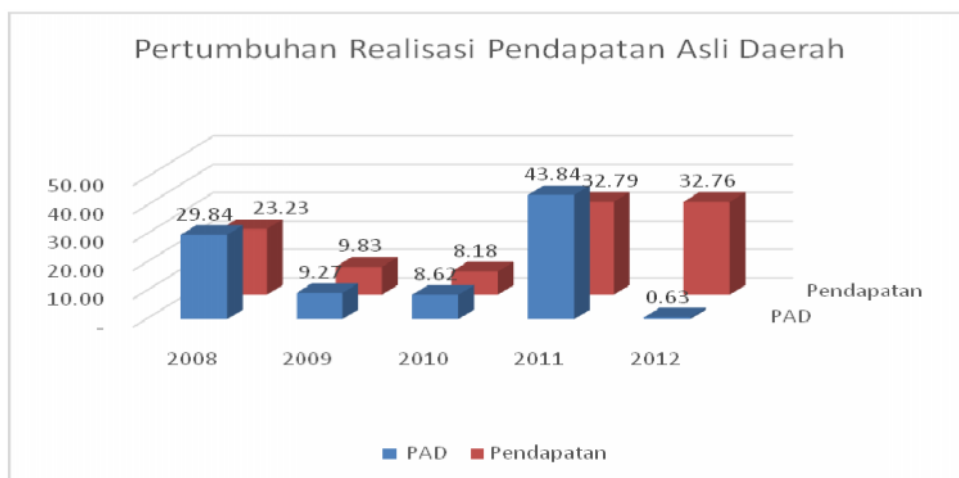
Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dari tabel diatas terlihat pendapatan daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,36 % pertahun. Pertumbuhan pendapatan ini diperoleh dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 18,44 % per tahun, kemudian pertumbuhan Dana Perimbangan rata-rata sebesar 14,68 % per tahun, dan pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar rata-rata 3.041,22 % per tahun. Penjelasan lebih lanjut tentang pendapatan daerah, sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Selama periode 2008-2012 Pendapatan Asli Daerah rata-rata tumbuh sebesar 18,44 % per tahun, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3.1  
Trend Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2012



Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah relatif sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, pada tahun 2011 terjadi pertumbuhan yang signifikan yakni dari 8,62 % pada tahun 2010 menjadi sebesar 43,84 % pada tahun 2011 dan kemudian menurun menjadi 0,63 % pada tahun 2012. Komponen pembentuk pendapatan asli daerah, yakni pajak daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18,15 % per tahun. Pertumbuhan Pajak Daerah cenderung sama dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pertumbuhan Retribusi Daerah cenderung sama dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, kecuali pada tahun 2012 dimana pertumbuhan Retribusi Daerah mencapai titik terendah yakni mencapai -82,99 %. Lain-lain Penerimaan selama periode tahun 2008-2012 rata-rata tumbuh sebesar 38,31 % per tahun.

#### b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan pada periode tahun 2008-2012 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 14,68 % per tahun yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak yang tumbuh sebesar rata-rata 27,54 % per tahun, Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,81 % per tahun, dan Dana Alokasi Khusus yang tumbuh sebesar rata-rata 16,45 % per tahun.

#### c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun termasuk pada periode tahun 2008-2012. Dari Rp.9,5 milyar pada tahun 2008 menjadi Rp. 442 milyar lebih pada tahun 2012.

### 3.1.2. Neraca Daerah

Selama tahun 2008 - 2012 aset mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 12,39 %, kewajiban tumbuh rata-rata sebesar 71,10% per tahun, ekuitas dana yang merupakan kekayaan bersih pemerintah (selisih antara aset dan utang pemerintah) tumbuh rata-rata sebesar 11,62 % pertahun, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2  
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2008-2012

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan
1.	ASET	12,39
1.1	ASET LANCAR	56,98
1.1.1	Kas	14,47
1.1.2	Piutang	100,26
1.1.3	Persediaan	217,41
1.2	ASET TETAP	10,16
1.2.1	Tanah	7,91
1.2.2	Peralatan dan mesin	4,96
1.2.3	Gedung dan bangunan	9,48
1.2.4	Jalan, irigasi dan jaringan	3,66
1.2.5	Asset tetap lainnya	12,94
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	339,73
1.2.7	Dst.	

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan
1.3	ASET LAINNYA	36,37
1.3.1	Tagihan penjualan angsuran	(5,20)
1.3.2	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	16,92
1.3.3	Kemitraan dengan pihak ketiga	0,53
1.3.4	Aset tak berwujud	9,19
1.3.5	Aset Lain-lain	56,52
	JUMLAH ASET DAERAH	12,39
2	KEWAJIBAN	71,10
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	71,10
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga	30,29
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	-
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	-
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	71,13
3	EKUITAS DANA	11,62
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	(28,17)
3.1.1	SILPA	8,14
3.1.2	Cadangan piutang	100,26
3.1.3	Cadangan persediaan	217,41
3.1.4	Pendapatan yang ditangguhkan	54,63
3.1.5	Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	71,13
3.2	EQUITAS DANA INVESTASI	12,39
3.2.1	Diinvestasikan dalam asset tetap	10,16
3.2.2	Diinvestasikan dalam asset lainnya	36,37
3.2.3	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	32,33
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EQUITAS DANA	12,39

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Rasio Lancar (*Current Ratio*) merupakan kemampuan pemerintah membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki. Pada tahun 2010 Provinsi NTB berada pada posisi 119,5 %, menjadi 42,05 % pada tahun 2011 dan 70,23 % pada tahun 2012.

Rasio Cepat (*Quick Ratio*) merupakan kemampuan pemerintah membayar kewajiban jangka pendek hanya berdasar aktiva lancar dengan mengabaikan (mengurangi) persediaan. Provinsi NTB memiliki Rasio Cepat 108,55 % pada tahun 2010 dan 34,04 % pada tahun 2011, serta 59,43 % pada tahun 2012.

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan porsi hutang dibandingkan dengan total aset. Semakin kecil ratio hutang terhadap aset

menunjukkan kemandirian yang baik suatu daerah. Provinsi NTB memiliki ratio hutang terhadap aset 2,52 % pada tahun 2010, 1,5 % pada tahun 2011, dan 1,6 % pada tahun 2012.

Rasio Hutang terhadap Modal juga menunjukkan posisi hutang terhadap modal, di mana rasio hutang terhadap modal Provinsi NTB adalah 1,63 % pada tahun 2010 dan 5,5 % pada tahun 2011 serta 5,5% pada tahun 2012. Secara rinci analisis rasio keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
**Tahun 2010-2012**

No	Uraian	2010	2011	2012
1	Rasio Lancar ( <i>currentratio</i> ) (%)	119,34	42,05	70,23
2	Rasio Quick ( <i>quickratio</i> ) (%)	108,55	34,04	59,43
3	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (%)	2,52	1,50	1,61
4	Rasio Hutang terhadap Modal (%)	1,63	5,55	5,55

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2010, 2011, dan 2012.

## 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Rata-rata realisasi Belanja Langsung adalah sebesar 92,81 % pertahun, sedangkan Belanja Tidak Langsung memiliki realisasi rata-rata sebesar 90,75 % pertahun, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Provinsi NTB**  
**Tahun 2010-2012**

No.	Uraian	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)	2012 (Rp.)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>385.403.837.784,00</b>	<b>426.228.698.897,00</b>	<b>436.435.436.469,00</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	266.875.185.400,00	299.600.681.140,00	324.641.906.099,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	87.463.713.057,00	92.416.353.762,00	89.743.674.059,00
3	Belanja Penerimaan	4.764.000.000,00	4.872.300.000,00	4.836.000.000,00

No.	Uraian	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)	2012 (Rp.)
	Anggota dan Pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH			
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah	11.454.196.600,00	14.188.489.058,00	932.261.650,00
5	Biaya jasa pelayanan kesehatan	14.846.742.727,00	15.141.624.937,00	210.614.510,00
6	Insentif pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	15.894.868.551,00
7	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	9.250.000,00	176.111.600,00
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>285.780.721.889,00</b>	<b>573.773.701.803,11</b>	<b>537.372.188.569,00</b>
1	Belanja Honorarium PNS	26.951.597.288,00	19.745.592.180,00	25.906.464.420,00
2	Belanja Uang Lembur	426.080.500,00	885.510.000,00	723.010.000,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	300.450.000,00	200.600.000,00	45.500.000,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.827.797.062,00	10.201.724.540,00	3.269.039.700,00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	0,00	963.495.000,00	984.262.500,00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	24.070.577.359,00	24.360.072.156,00	22.579.968.657,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	3.874.362.560,00	861.937.000,00	468.287.500,00
8	Belanja Pakaian khusus dan Hari-hari Tertentu	1.187.658.200,00	1.324.556.750,00	935.863.075,00
9	Belanja perjalanan dinas	73.532.647.017,00	65.166.462.134,00	77.442.743.833,00
10	Belanja perjalanan pindah tugas	52.150.300,00	0,00	21.872.800,00
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	2.000.000,00
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	144.557.401.603,00	450.063.752.043,11	404.993.176.084,00
	<b>Total</b>	<b>671.184.559.673,00</b>	<b>1.000.002.400.700,11</b>	<b>973.807.625.038,00</b>



Realisasi Belanja Pegawai memiliki rata-rata pertumbuhan 6,54% per tahun, dengan trend yang menurun dari tahun 2008-2012. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi terus melakukan upaya efisiensi penggunaan anggaran dalam tubuh birokrasi. Sedangkan pada pos Belanja langsung, pertumbuhan Belanja Urusan Wajib memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 21,46 per tahun sedangkan Urusan Pilihan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 15,93% per tahun. Peningkatan porsi belanja pegawai dan belanja per urusan selain dari semakin tingginya kebutuhan pengelolaan birokrasi, juga dampak dari terjadinya inflasi yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

**Tabel 3.5**  
**Analisa Proporsi Belanja Kebutuhan Aparatur Tahun 2008-2012**

Tahun	Belanja Tidak Langsung			Belanja Langsung		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2008	625.135.114.919,26	590.847.410.625,00	94,52	495.448.426.118,70	449.099.103.994,00	90,64
2009	775.856.157.499,67	724.513.298.909,00	93,38	419.112.856.266,63	375.984.593.964,00	89,71
2010	962.514.399.365,52	859.304.825.384,85	89,28	483.366.608.420,47	416.441.760.014,50	86,15
2011	932.831.504.605,00	886.085.265.058,00	94,99	817.505.219.461,00	764.516.009.528,27	93,52
2012	1.462.938.528.069,04	1.344.576.248.294,53	91,91	901.500.342.680,00	844.713.400.480,00	93,70
	Rata-rata		92,81			90,75

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi NTB, 2012 (data diolah)

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Realisasi pendapatan tahun 2010 sebesar Rp. 1.272.218.058.843,65 dengan posisi belanja daerah sebesar Rp. 1.275.746.585.399,35 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 3.528.526.555,70. Kondisi ini mengalami perbaikan pada tahun 2012, dimana dengan pendapatan daerah sebesar Rp. 2.242.817.184.524,64 belanja daerah sebesar Rp. 2.189.181.696.292,53 terjadi surplus pendapatan sebesar Rp. 53.635.488.232,11. Adapun defisit anggaran tahun 2010 sebesar Rp. 3.528.526.555,70 imbangi oleh penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 3.387.539.579,- dan SILPA sebesar Rp. 70.127.301.342,62. Sementara untuyuk tahun 2011 dan tahun 2012 terjadi surplus pendapatan, bila dikalkulasi dengan SILPA dan penerimaan pinjaman pada tahun yang sama akan memberikan kemampuan pendanaan pembangunan yang lebih besar khususnya investasi daerah serta penyertaan modal di sektor swasta. SILPA pada tahun 2011 terealisasi sebesar 145,6% dan SILPA tahun 2012 sebesar 160,6% jauh melampaui realisasi SILPA tahun 2010, sebagaimana tabel-tabel berikut.

**Tabel 3.6**  
**Defisit Riil Anggaran Provinsi NTB**

No.	Uraian	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)	2012 (Rp.)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.272.218.058.843,65	1.689.351.248.722,39	2.242.817.184.524,64
2	Belanja Daerah	1.275.746.585.399,35	1.650.601.274.586,27	2.189.181.696.292,53
	<b>Surplus / (Defisit) Riil</b>	<b>(3.528.526.555,70)</b>	<b>38.749.974.136,12</b>	<b>53.635.488.232,11</b>

**Tabel 3.7**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi NTB**

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil					
		2010 (Rp.000)	Realisasi 2010 (Rp.000)	2011 (Rp.000)	Realisasi 2011 (Rp.000)	2012 (Rp.000)	Realisasi 2012 (Rp.000)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	70.127.301,343	11.698.162,560	11.699.958,733	17.031.799,849	17.031.799.849,04	27.348.512,360
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00		0,00		0,00	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00		0,00		0,00	
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00		0,00		0,00	
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.387.539,579		5.581.866,980		681.224.279,00	
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00		0,00		0,00	

Sumber: *Biro Keuangan Setda Provinsi NTB, 2013*

### 3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

### 3.3.1. Analisis pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Biaya yang dikeluarkan setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam kebutuhan pelayanan dasar pemerintah daerah disebut belanja periodik prioritas utama. Pada tahun 2013-2014, belanja tidak langsung mengalami peningkatan rata-rata 0,33%, sedangkan belanja langsung meningkat rata-rata 3,15%, sebagaimana tabel-tabel berikut.

**Tabel 3.8**  
**Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta**  
**Prioritas Utama Provinsi NTB**

No.	Uraian	2012 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan dari Tahun 2011 (%)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	324.641.906.099	8,36
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	4.836.000.000	-0,75
3	Belanja Bunga	0	0
4	Belanja Bagi Hasil	195.501.620.900	10,66
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>		
1	Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	0	0
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	45.500.000	-77,32
3	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	26.183.932.410	-2,64
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	1.294.597.500	-22,05
<b>C</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>		
1	Pembiayaan Dana Cadangan	0	0
2	Pembayaran Pokok Utang	0	0
3	Badan usaha milik daerah (BUMD)	42.000.000.000	31,25

No.	Uraian	2012 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan dari Tahun 2011 (%)
4	Pemberian Dana Bergulir	2.000.000.000	-71,43
	<b>Total (A+B+C)</b>	<b>596.503.556.909,00</b>	<b>8,67</b>

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTB, 2013

**Tabel 3.9**  
**Belanja Periodik Prioritas Utama Tahun 2013-2014**

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
1	Belanja Tidak Langsung	1.648.323.561.600	1.699.164.493.500	0,3
2	Belanja Langsung	919.606.734.900	1.135.040.248.300	3,15
3	Pembiayaan Penerimaan	27.998.612.700	10.650.000.000	(61,96)
4	Pembiayaan Pengeluaran	36.767.745.000	40.000.000.000	8,79

Sumber: Hasil Analisa

### 3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

#### a. Proyeksi data pendapatan daerah

Pendapatan Daerah yang dikotribusikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2008-2013 mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Berdasarkan trend Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2014 -2018 dapat diproyeksikan, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.10**  
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2008-2018

Tahun	Total Pendapatan Daerah
2008	1.049.655.365.973
2009	1.173.043.588.526
2010	1.272.218.058.844
2011	1.689.351.248.722
2012	2.242.778.381.168
2013	2.594.808.258.800
2014	2.863.554.741.800

Tahun	Total Pendapatan Daerah
2015	3.170.960.250.000
2016	3.519.523.835.582
2017	3.885.214.504.729
2018	4.287.776.894.000

Sumber: Data Dispenda Prov. NTB (Diolah)

Pendapatan Daerah pada tahun 2012 tercatat Rp 2 triliun lebih mengalami peningkatan menjadi Rp 4,28 triliun lebih pada tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,52%. Hal ini diakibatkan oleh proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013-2018 tumbuh rata-rata 15,69%, sebagai akibat terjadinya pertumbuhan beberapa instrumen pembentuk PAD seperti pajak daerah (11,66%), retribusi daerah (4,94%), laba perusahaan daerah (5,07%) dan lain-lain penerimaan (43,06%). Kondisi ini akan tercapai bila perangkat daerah mampu mempertahankan kinerja dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, pencermatan dalam menggali potensi PAD dan sumber daya manusia (SDM) yang melakukan penarikan PAD. Di samping itu, masuknya pajak rokok sebagai bagian dari PAD menyebabkan nilai PAD terus mengalami peningkatan beberapa tahun ke depan. Data estimasi PAD sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.11**  
**Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008-2018**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2008	413.161.193.105
2009	474.455.062.324
2010	515.340.956.846
2011	741.291.174.995
2012	745.941.063.054
2013	858.849.520.116
2014	977.201.846.700
2015	1.110.471.318.000
2016	1.277.715.897.000
2017	1.489.588.230.000
2018	1.762.840.194.000

Sumber: Data Dispenda Prov. NTB (Diolah)

Dana Perimbangan memiliki *trend* peningkatan sampai dengan tahun 2018. Karena merupakan transfer pusat maka salah satu faktor penentu besar kecilnya dana perimbangan akan bersumber dari kinerja perekonomian nasional. Dari

tahun 2008-2012 Dana perimbangan mengalami peningkatan dengan perkiraan tahun 2012-2018 akan pertumbuhan rata-rata 11,27 %. Peningkatan nilai dana perimbangan sebagai akibat dari peningkatan beberapa instrumen pembentuknya, yaitu dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diproyeksi tumbuh rata-rata 19,44 % rentang tahun 2013-2018, DAU tumbuh rata-rata 9 % atau bahkan lebih dan DAK tumbuh rata-rata 6,80 % atau lebih seiring perubahan formulasi pendanaan pembangunan didaerah dari Dana Dekonsentrasi ke Dana Alokasi Khusus untuk beberapa kegiatan. Oleh karena itu, diproyeksikan Dana Perimbangan dari sebesar Rp.1,054 triliun pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp. 1,8 triliun lebih pada tahun 2018, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.12  
Proyeksi Dana Perimbangan Tahun 2008-2018

Tahun	Dana Perimbangan
2008	626.994.172.868
2009	701.175.944.010
2010	756.256.439.498
2011	855.310.098.727
2012	1.054.470.183.114
2013	1.144.390.537.533
2014	1,215,275,790,000
2015	1,277,690,032,000
2016	1,666,729,148,582
2017	1,763,039,605,729
2018	1,829,091,365,000

Sumber: Dispenda Prov. NTB (Diolah)

Sumber lain pembentuk Pendapatan Daerah adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dimana terjadi lompatan drastis di tahun 2012. Karena terjadinya fluktuasi yang tinggi dalam porsi Pemasukan Lain-Lain Daerah Yang Sah sehingga analisis trend tidak dapat dilakukan, artinya variabel *trend* (series waktu) tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor tersebut. Sungguhpun demikian, pendapatan daerah yang sah akan mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.13  
Proyeksi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2008-2018

Tahun	Lain-lain Pendapatan yang Sah
2008	9.500.000.000,00
2009	341.325.000
2010	620.662.500,00

Tahun	Lain-lain Pendapatan yang Sah
2011	92.749.975.000
2012	442.367.135.000,00
2013	502.691.250.100,00
2014	502.691.250.100,00
2015	522.798.900.000,00
2016	575.078.790.000,00
2017	632.586.669.000,00
2018	695.845.335.000,00

Sumber: Dispenda Prov. NTB (Diolah)

b. Proyeksi belanja daerah

Seperti halnya Pendapatan Daerah, sisi belanja juga mengalami pertumbuhan (*trend*) yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini dapat disebabkan semakin bertambahnya pembiayaan daerah dan juga pergerakan indeks harga konsumen (IHK) yang terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir.

Total belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2008 adalah lebih dari Rp 1 triliun, hasil proyeksi menunjukkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 3,5 triliun lebih. Rata-rata pertumbuhan Total Belanja pemerintah pada tahun prediksi (2014-2018) adalah sebesar 9.52 %.

Tingginya Total Belanja adalah sebagai akibat dari tingginya Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pemerintah. Di mana diproyeksikan belanja tidak langsung yang pada tahun 2008 sebesar Rp. 590 Miliar lebih akan melonjak menjadi Rp. 2,4 triliun lebih pada tahun 2018. Belanja Langsung juga diprediksi mengalami peningkatan, pada tahun 2008 belanja langsung tercatat sebesar Rp. 449 miliar lebih diproyeksikan sebesar Rp. 1,6 triliun lebih di tahun 2018. Tabel Proyeksi Pendapatan Total, Pendapatan Tidak Langsung dan Pendapatan Langsung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.14

Proyeksi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung Tahun 2008-2018

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
2008	590.847.410.625	449.099.103.994	1.039.946.514.619
2009	724.513.298.909	375.984.593.964	1.100.497.892.873
2010	859.304.825.385	416.441.760.015	1.275.746.585.399
2011	886.085.265.058	764.516.009.528	1.650.601.274.586

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
2012	1.344.576.248.295	844.713.400.480	2.189.289.648.775
2013	1.381.774.302.101	924.078.976.157	2.305.853.278.258
2014	1,699,164,493,500	1,135,040,248,300	2,834,204,741,800
2015	1,860,924,953,281	1,243,096,079,938	3,104,021,033,219
2016	2,038,085,008,834	1,361,438,826,748	3,399,523,835,582
2017	2,232,110,701,675	1,491,047,803,055	3,723,158,504,729
2018	2,444,607,640,474	1,632,995,553,906	4,077,603,194,379

Sumber: Dispenda Prov. NTB (Diolah)

### 3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah dalam rangka mengukur kapasitas keuangan daerah yang dialokasikan untuk mendanai program pembangunan jangka menengah daerah. Kapasitas keuangan daerah adalah total penerimaan daerah dikurangi berbagai belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.15**

**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah  
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi NTB  
Tahun 2014-2018**

No.	Uraian	Proyeksi				
		2014 (Rp.)	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)
1	Pendapatan Daerah	2,863,554,741,800	3,170.960.250.000	3,519.523.835.582	3,885.214.504.729	4,287.776.894.000
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	10,000,000,000	8,500,000,000	7,225,000,000	6,142,000,000	5,527,800,000
	Total Penerimaan	2,873,554,741,800	3,179.460.250.000	3,526.748.835.582	3,891.356.504.729	4,293.304.694.000
	Dikurangi :					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Riil serta Prioritas Utama	1,067,224,406,300	1,173,946,846,930	1,291,341,531,620	1,420,475,684,820	1,562,523,253,305
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1,806,330,335,500	2,005.513.403.070	2,235.407.303.962	2,470.880.819.909	2,730.781.440.695



Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan setelah mempertimbangkan pendapatan, penerimaan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan yang awajib dan mengikat, maka trend kapasitas riil tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 1,806,330,335,500 ,- menjadi Rp. 2.730.781.440.695,- pada tahun 2018

**Tabel 3.16**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan**  
**Keuangan Daerah Provinsi NTB**  
**Tahun 2014-2018**

No.	Uraian	Proyeksi				
		2014 (Rp.)	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1,806,330,335,500	2,005.513.403.070	2,235.407.303.962	2,470.880.819.909	2,730.781.440.695
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I	-	-	-	-	-
II.a	Belanja Langsung	1,135,040,248,300	1,243,096,079,938	1,361,438,826,748	1,491,047,803,055	1,632,995,553,906
II.b	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
	Dikurangi :					
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	22,794,842,800	25,074,327,080	27,581,759,788	30,339,935,767	33,373,929,344
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	40,000,000,000	44,000,000,000	48,400,000,000	53,240,000,000	58,564,000,000
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	1,197.835.091.100	1,312.170.407.018	1,437.420.586.536	1,574.627.738.822	1,724.933.484.882

No.	Uraian	Proyeksi				
		2014 (Rp.)	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	608.495.244.400	693.342.996.052	797.986.717.426	896.253.081.087	1,005.847.955.813
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					

*Sumber: Dispenda Prov. NTB dan Biro Keuangan Setda Provinsi NTB (Diolah)*

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa kapasitas keuangan daerah dalam membiayai belanja pemerintah provinsi ke depan menunjukkan peningkatan dari Rp. 608.495.244.400,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 1,005.847.955.813,- pada tahun 2018.